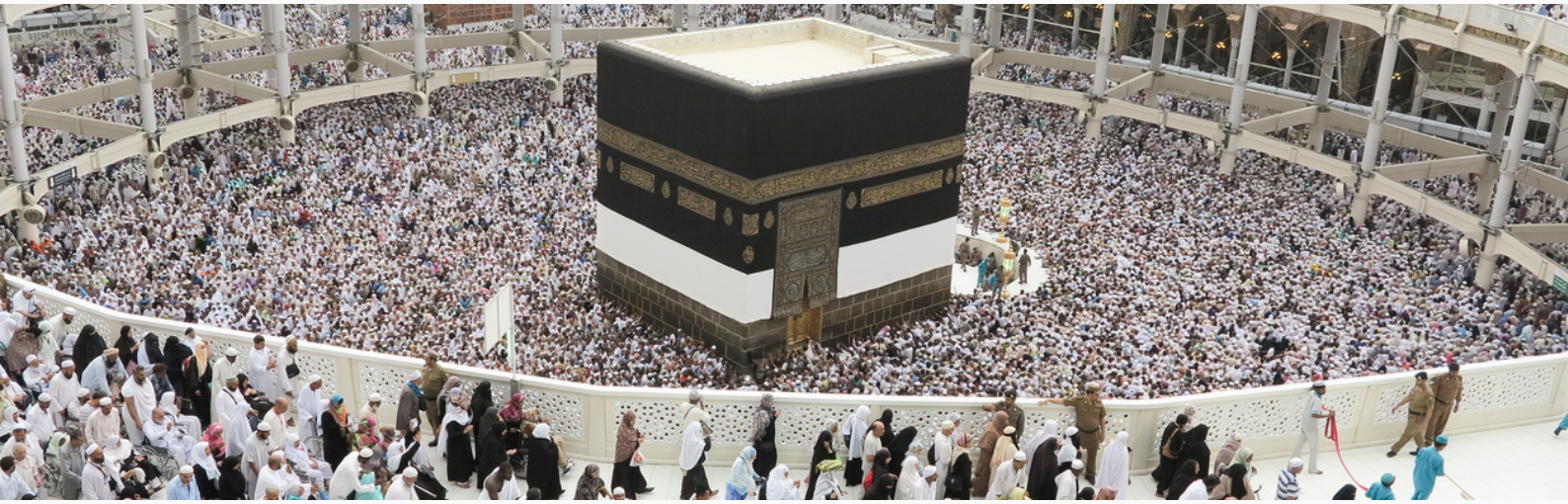




PENGUATAN EKOSISTEM EKONOMI HAJI YANG TERINTEGRASI

Sony Hendra
Achmad Muchaddam
Nidya Waras Sayekti
Lisnawati

LATAR BELAKANG

Ibadah haji merupakan ibadah jasmaniyah dan maliyah, sebab dalam menunaikan ibadah haji selain jiwa dan raga, juga ada harta yang harus dipersiapkan. Animo umat Muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji sangat besar. Seiring peningkatan waiting list jemaah haji, dana haji yang harus dikelola juga semakin besar. Potensi pertumbuhan ekonomi dari pemenuhan kebutuhan calon jemaah haji dan pengelolaan dana hajinya sangat besar. Saat ini, potensi pembangunan ekosistem ekonomi haji belum dioptimalkan secara maksimal oleh Indonesia.

PERMASALAHAN

bagaimana membangun ekosistem ekonomi haji dalam upaya meningkatkan perekonomian Indonesia. Bagaimana grand design yang harus dibuat pemerintah agar ekosistem ekonomi haji di Indonesia dapat terwujud dan terintegrasi sehingga memberikan benefit bagi jemaah haji khususnya dan negara tentunya.

HASIL DAN ANALISIS

Beberapa alasan kenapa Indonesia harus segera memperkuat ekosistem ekonomi haji, yakni:

a. Pasar ekonomi haji masih sangat terbuka. b. Manfaat haji mencakup spiritual, sosial persaudaraan, dan juga ekonomi (tjaraah/commerce). c. Hal ini karena Indonesia belum memiliki ekosistem yang baik untuk menopang pelaksanaan haji dan umrah. d. Secara ekonomi, haji menjadi sektor yang dinamis di Indonesia. e. Ekonomi haji dan umrah juga dapat diproyeksikan untuk melestarikan budaya dan nilai tradisional masyarakat Indonesia.

Dalam penyusunan Grand Design Ekosistem Ekonomi Haji, pemerintah harus lebih memprioritaskan keterlibatan pelaku UMKM dalam ekosistem ekonomi haji, dan diatur oleh sebuah regulasi berdasarkan konsensus bersama para stakeholder haji dan umroh.

REKOMENDASI

Penguatan ekosistem ekonomi haji yang terintegrasi perlu segera diwujudkan di Indonesia. Perwujudan tersebut harus dimulai dari komitmen pemerintah. Di dalam negeri, perlu adanya dukungan dan koordinasi yang sejalan dari Kementerian Agama, BPKH, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta para pelaku usaha. Sedangkan dengan pihak luar (Arab Saudi), Pemerintah Indonesia harus bersinergi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan BPKH untuk berdiplomasi dalam mengembangkan investasi dana jemaah haji di Arab Saudi.